

PERAN ETIKA PROFESI BAGI DUKUNGAN STRATEGIS PROFESIONALISME PUSTAKAWAN

Supriyanto

Pustakawan Perpustakaan Nasional RI; Dosen YARSI

Abstrak

Tatkala peran pustakawan sebagai mediator (fasilitator) bagi ketersediaan informasi keperluan pemustaka, terdistribusi dengan baik, lancar dan berkelanjutan pastinya perpustakaan, pustakawan dekat dengan masyarakatnya. Itulah profesionalisme dengan prospek masa depan bagi yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidangnya “kepustakawanan”, yaitu meliputi: pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan didukung dengan baik pilar-pilar profesi seperti ilmu (kepustakawanan), organisasi profesi (IPI), etika profesi, dan bermuara pada pengakuan (aktualisasi diri) sebagai hasil akhir dukungan strategis bagi profesionalisme pustakawan. Untuk itu seorang pustakawan sepatutnya mengedepankan strategi pengembangan dengan kesadaran, cita-cita, ilmu pengetahuan dan tekad sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kata kunci: profesionalisme pustakawan, mediator, etika profesi

A. Pendahuluan

Tenaga Pengelola Perpustakaan atau biasa disebut sebagai “Pustakawan” resmi/sah diakui keberadaannya menjadi jabatan profesional atau dilingkungan pemerintahan sebagai jabatan fungsional dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 18/ MENPAN/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, dimana nampak dalam salah satu pertimbangannya *“bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan manfaat perpustakaan dan dokumentasi sangat diperlukan adanya Pustakawan yang ditugaskan secara penuh pada perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah”*.

Dan beberapa kali disempurnakan, pertama dengan Keputusan MENPAN No. 33/1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Ke-dua Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Ke-dua terbitnya Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, yang seharusnya diperhatikan dimana sangat

diperlukan bahwa pejabat fungsional harus memiliki kualifikasi profesional dalam bidangnya.

Terakhir disempurnakan dengan Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dimana pertimbangan utama *“bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pustakawan, perlu mengatur kembali Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/ 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya”*. Bermakna bahwa seseorang pustakawan dapat meniti kariernya dengan baik tatkala didukung keserasian peningkatan profesionalisme pustakawan itu sendiri, dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas-tugas kepustakawanan, yaitu meliputi: pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan.

Tugas utama Pustakawan adalah menyediakan informasi (*information provider*) sebanyak mungkin baik berupa karya cetak (*printed*), karya rekam (*recorded*), dan/atau terpasang (*“on line”*).